



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 12 Mei 2017

Halaman: 9

PANSUS LHP BPK BERI TENGGAT WAKTU

Pemkot Optimis Penunggak Pajak Patuhi Aturan

YOGYA (KR) - Wajib pajak yang diketahui memiliki tunggakan pajak tahun 2016 menyatakan kesediaan untuk melunasi kewajiban. Pemkot pun optimis, penunggak pajak yang disorot Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut bakal menaati aturan.

Tunggakan pajak atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogya 2016 mencapai miliaran rupiah. Sebagian besar dari kalangan pengusaha jasa reklame dan perhotelan. "Kami sudah lakukan pendekatan dan ada kesediaan untuk membayar. Mereka mengajukan permohonan tempo agar semua dana dapat terkumpul," urai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Kadri Renggono, Kamis (11/5).

Secara rinci, hasil LHP BPK atas PAD Kota Yogya 2016, sedikitnya ada empat hotel yang menunggak pajak hingga bertahun-tahun. Masing-masing tiga hotel yang menunggak pada 2011-2014 dengan nilai kurang bayar mencapai Rp 599,3 juta. Kemudian ada satu hotel yang menunggak pada 2011-2012 sebesar Rp 493,8 juta.

Sedangkan dari sektor reklame, terdapat 13 titik yang dimiliki delapan pengusaha dengan total piutang pajak sebesar Rp 953,2 juta. Belum lagi sektor retribusi jasa parkir dan persampahan yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

Terkait permohonan tempo yang diajukan penunggak pajak tersebut, imbuh Kadri, sudah disetujui. Hal ini lantaran proses penagihan membutuhkan proses dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun pihaknya memberi tempo maksimal 21 hari.

Meski demikian, BPKAD tidak akan menunggu hingga batas tempo melainkan tetap melakukan monitoring. "Semuanya ada iktikad baik.

Bahkan sudah ada yang menyeter ke kas daerah sebesar Rp 350 juta. Sisanya masih kami kejar terus. Upaya ini juga kami laporkan ke Inspektorat agar diteruskan ke Pansus LHP BPK," paparnya.

Ketua Pansus LHP BPK Nasrul Khairi mengaku belum mendapat laporan terkini terhadap penagihan piutang pajak tersebut. Bahkan, pihaknya akan memberikan tenggat waktu kepada Pemkot guna menindaklanjuti LHP BPK hingga akhir bulan ini.

Nasrul mengaku, pansus yang dibentuk sejak Maret lalu, sudah menggelar klarifikasi. Terutama dengan memanggil sejumlah pihak mulai auditor BPK, para wajib pajak yang menunggak, organisasi perhotelan hingga jajaran Pemkot. "Pansus ini kami targetkan bekerja sampai akhir Mei. Sebelum berakhir, seharusnya Pemkot sudah bisa menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh BPK," tandasnya.

Oleh karena itu, seluruh hasil kinerja Pemkot dalam menagih piutang pajak, akan dijadikan pertimbangan bagi pansus. Jika masih ada rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti, maka rencana kerja anggaran tahun 2018 bisa terganggu. "Kami memang belum menentukan kesimpulan. Tapi seharusnya Pemkot dapat melihat persoalan ini secara lebih serius," tegas Nasrul. (Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. BPKAD	☐ Negatif	☐ Amat Segera
2.	☐ Positif	☐ Segera

☒ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005